



RENCANA
KERJA

PERUBAHAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN



2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan Pengawasan secara tepat dan terarah.

Rencana Kerja Perubahan ini memberikan gambaran dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dengan tercapainya arah kebijakan pembangunan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Serang, Agustus 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



Dr. Ir. MOCH TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. LATAR BELAKANG 1

 1.2. DASAR HUKUM..... 3

 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... 5

 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA..... 6

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN
 II TAHUN BERKENAAN 8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
 DAERAH 60

BAB IV PENUTUP 66

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Daerah Provinsi Banten memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis dalam menjaga dan mengawal akuntabilitas Pemerintah Provinsi Banten. Akuntabilitas sebagai perwujudan tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya yang ada di Pemerintah Provinsi Banten harus dikelola dan dijaga agar dapat mewujudkan *Good Governance* menuju *Clean Governance* pada Pemerintah Provinsi Banten.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Provinsi Banten berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan rencana strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat.

Rencana Kinerja merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah serta RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

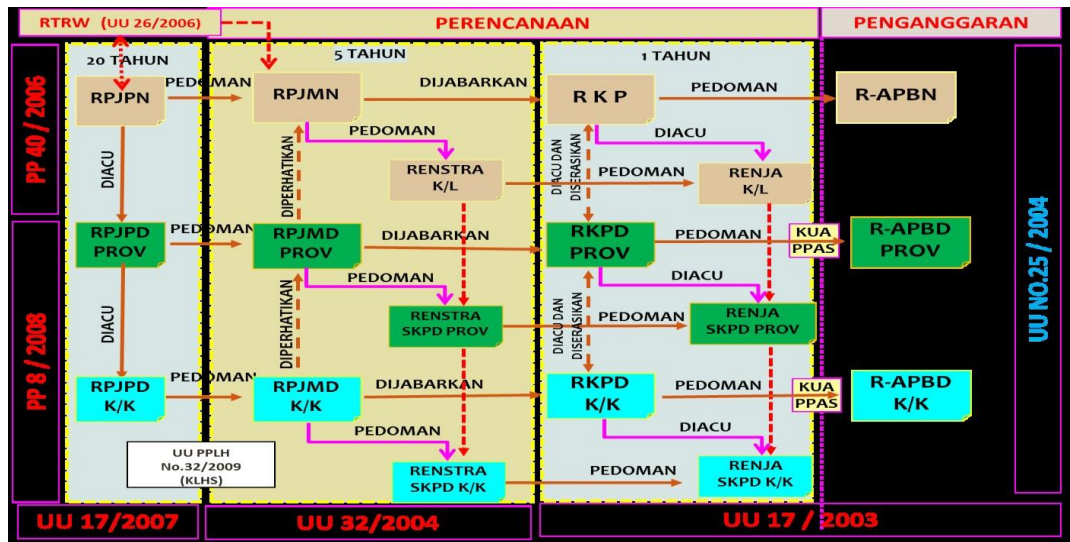
Dalam Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang salah satu

amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024. Diteruskan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dimana Pemerintah Provinsi Banten sebagai salah satu Provinsi yang diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, akan digunakan sebagai dokumen masa transisi sebagai pengganti RPJMD 2017-2022 saat berakhirnya masa Kepala Daerah. Setelah adanya Dokumen RPD 2023-2026 Provinsi Banten dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023-2026 kedua dokumen tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Daerah maka diwajibkan kepada semua Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

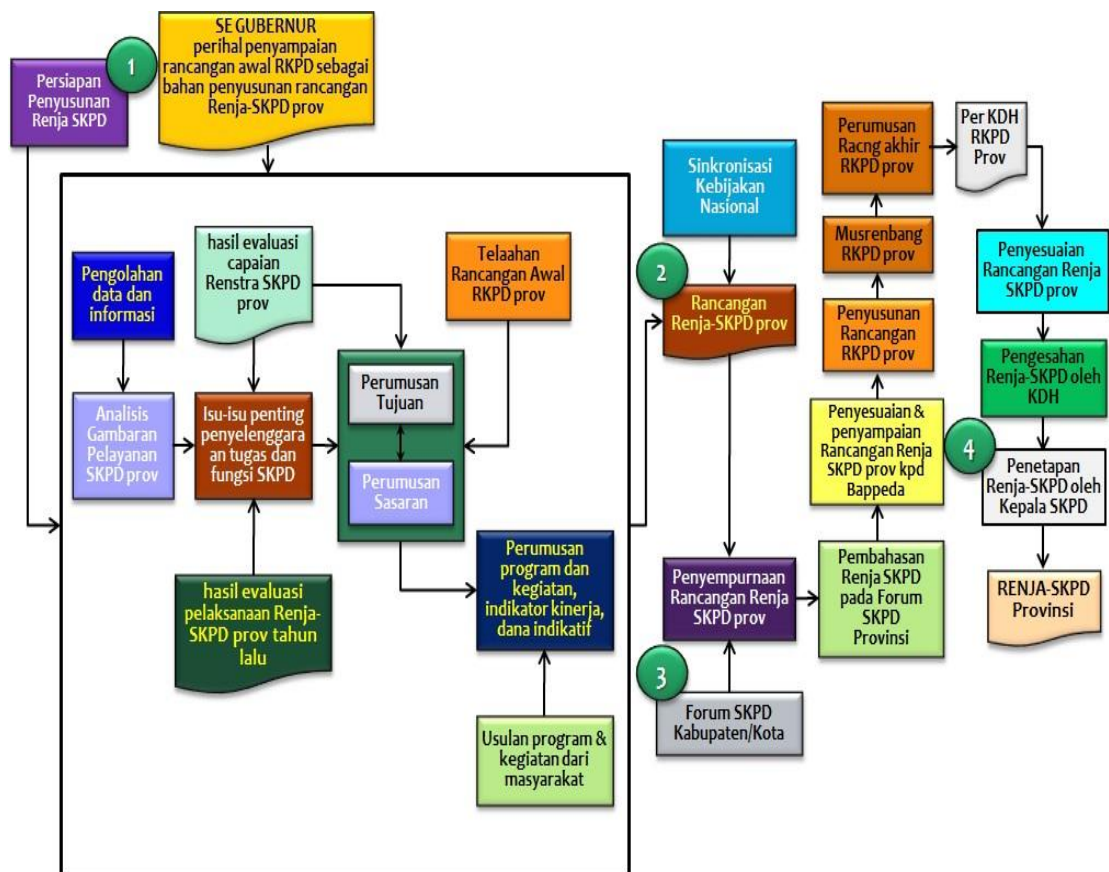
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan dokumen resmi yang disusun Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten.

Renja Perubahan OPD merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada RKPD. Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, maka sebagai langkah awal proses perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Banten dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Provinsi Banten Tahun 2021 dimana setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi dan berpedoman pada Renstra-OPD. Adapun keterkaitan antar dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.1
Keterkaitan antar dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan nasional



Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Provinsi

1.2 Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
14. Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2022 tentang Renstra 2023-2026;
16. Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dimaksudkan untuk melanjutkan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ada pada Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023–2026 kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan. Lebih jauh lagi penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam rangka merumuskan program kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi serta sebagai upaya mengimplementasikan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Banten dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 adalah:

- 1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten;
- 2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2024 berdasarkan kebijakan, evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.
- 3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- 4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Banten;

- 5) Memberikan pedoman kepada Inspektorat Daerah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- 6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab awal ini akan mengemukakan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini menguraikan pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II ditahun 2023 dengan penjelasannya.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja Perubahan beserta pendanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan berisikan penutup Renja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Inspektorat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsi bagian pembinaan dan pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan entitas seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintah masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pada review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Banten sampai dengan triwulan II tahun 2023 dibagi berdasarkan 3 pendekatan, yaitu :

1. Review pelaksanaan renja berdasarkan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
2. Review pelaksanaan renja berdasarkan program Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
3. Review pelaksanaan renja berdasarkan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Tabel 2.1 Pencapaian Realisasi Renja berdasarkan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten
sampai dengan triwulan II tahun 2023

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Realisasi s/d Triwulanan II	Capaian Triwulanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP	nilai	3,14	3,04	96,82	<u>Keterangan</u> : indikator Ini di Nilai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten yang biasanya di keluarkan januari/februari 2024 <u>Faktor Pendorong</u> 1. Inspektorat telah fokus untuk mendampingi OPD dalam pelaksanaan SPIP 2. Akan ada pelatihan untuk peningkatan kapasitas APIP <u>Faktor Penghambat</u>: 1. Kurangnya kompetensi SDM OPD dalam implementasi SPIP 2. Kurangnya sosialisasi SPIP terintegrasi dari BPKP
		Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	nilai	14	15,30	109,29	<u>Keterangan</u> : Hasil evaluasi sakip di hitung oleh Kemenpan RB yang di keluarkan pada bulan desember <u>Faktor Pendorong</u> : 1. Pendampingan pada saat Evaluasi SAKIP /Perbaikan hasil evaluasi 2. Mengusulkan Diklat SAKIP baik dari BPKP maupun Kemendagri 3. terbitnya Pergub nomor 33 tahun 2022 tentang pedoman evaluasi SAKIP yang digunakan oleh OPD dan Evaluator <u>Faktor Penghambat</u> : 1. Kompetensi SDM OPD dalam penyusunan SAKIP 2. belum semua evaluator mengikuti diklat

		Sakip Perangkat Daerah	nilai	70-80	81	115,71	<u>Keterangan</u> : Hasil Evaluasi SAKIP OPD di hitung oleh Inspektorat pada bulan maret 2024 <u>Faktor Pendorong</u> : 1. Adanya Pedoman penyusunan SAKIP 2. Keterlibatan pimpinan <u>Faktor Penghambat</u> : Koordinasi belum efektif antar sub/bidang
2	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit	1	0,00	0,00	<u>Keterangan</u> : Indikator Unit ZI dilakukan oleh Kemenpan RB yang sampai saat ini masih dalam tahapan seleksi yang biasanya diumumkan di bulan November <u>Faktor Pendorong</u> : 1. Telah dilakukan pendampingan terhadap 4 unit kerja DPMPTSP, RSUD Banten, SMAN 1 Kab.Tangerang, UPTPPD Cikande 2. Tidak ada pembatasan unit pengusulan ZI oleh Menpan <u>Faktor Penghambat</u> : Komitmen ASN di Dalam Unit kerja yang di dampingi unit kerja Tidak ada IKU pada setiap OPD Kebijakan pusat berubah pada tahun 2023 sehingga mekanismenya mengalami perubahan

Tabel 2.2 Pencapaian Realisasi Renja berdasarkan Program Inspektorat Daerah Provinsi Banten
sampai dengan triwulan II tahun 2023

Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan	Realisasi s/d Triwulanan II	Capaian Triwulanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pesentase jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti	%	80	82,00	82,00	<u>Keterangan:</u> Prosentase penyelesaian hasil pengawasan didapatkan dari rumusan (jumlah rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah total rekomendasi temuan) dikalikan 100%. Dengan realisasi sebagai berikut: - Rp.19.526.042.067,7 tindaklanjut dari Rp.23.766.892.413,54 rekomendasi BPK - 0 tindaklanjut dari 0 rekomendasi Irjen - Rp.755.717.122 di tindaklanjuti dari Rp.1.079.395.613 sehingga = $((19.526.042.067,7 + 0 + 755.717.122) / (23.766.892.413,54 + 0 + 1.079.395.613)) \times 100\% = 82\%$ <u>Faktor Pendorong</u> 1. Koordinasi secara intensif, efektif dan kohempresif 2. Di foloowup setiap hari <u>Faktor penghambat</u> 1. OPD belum dapat memahami sepenuhnya temuan dan hasil rekomendasi BPK

	Persentase ketercapaian penyelenggaraan pengawasan	%	100	41,86	41,86	<u>Keterangan :</u> Jumlah dokumen pengawsan yang dikeluarkan/jumlah pengawasan yang dilakukan - Untuk mendukung pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, saat ini masih dalam tahap pengembangan dari blueprint aplikasi pengawasan terintegrasi (e-audit) <u>Faktor Pendorong :</u> - SDM yang profesional,integritas dan kompeten - adanya pedoman <u>Faktor Penghambat :</u> - Tugas di luar PKPT - Tugas pengawasan yang bertumpuk/beririsan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	100	61,40	61,40	<u>Keterangan :</u> Realisasi menggunakan nilai akumulasi Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meta indikator : akumulasi persentase ketercapaian kinerja Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <u>Faktor Pendorong :</u> 1. Merupakan kegiatan wajib mengikat yang harus dilakukan 2. Sarana dan prasarana pendukung memadai <u>Faktor Penghambat :</u> 1. Bersifat persediaan sehingga realisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/kondisi 2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada sistem informasi terkait memerlukan waktu yang cukup sehingga mengakibatkan pekerjaan tertunda 3. adanya optimalisasi

Program Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	100	70,59	70,59	Keterangan : Pendampingan ke 12 OPD RB <u>Faktor Pendorong :</u> - Pedoman terkiat monev RB <u>Faktor Penghambat :</u> - Terlambatnya turunnya kebijakan dari pusat
------------------------------------	---	---	-----	-------	-------	--

Tabel 2.4 Pencapaian Realisasi Renja berdasarkan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten
sampai dengan triwulan II tahun 2023

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	target s.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II		keterangan
		Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (%)	
1	2	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,13	252.870.000	38,67	97.790.000	98,83	38,67	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	244.200.000	1	96.590.000	100,00	39,55	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat persiapan forum Renja 2024 2. Penjadwalan untuk pelaksanaan Forum OPD 3. Pelaksanaan Forum OPD 4. Penyusunan Matrik RKPD 2024 5. Penginputan RKPD 2024 6. Penyempurnaan RKPD 2024 Faktor Penghambat: 1. Adanya Optimalisasi Faktor Pendukung: Adanya jadwal Forum OPD Adanya aturan Forum OPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	0	0,00	0,00	Ketrangan Pekerjaan Fisik Yang sudah dilakukan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Dijadwalkan di bulan Oktober 2023
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0	-	0	0,00	0,00	Ketrangan Pekerjaan Fisik Yang sudah dilakukan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Dijadwalkan di bulan Oktober 2023
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0	-	0	0,00	0,00	Ketrangan Pekerjaan Fisik Yang sudah dilakukan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Dijadwalkan di bulan Oktober 2023

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	0	-	0	0,00	0,00	Ketrangan Pekerjaan Fisik Yang sudah dilakukan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Dijadwalkan di bulan Oktober 2023
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	2.700.000	8	0	100,00	0,00	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan Laporan Bulanan (6 laporan) 2. Penyusunan Laporan Triwulan (2 laporan) Faktor Penghambat: 1. terlambatnya penyelesaian kegiatan Faktor Pendukung: adanya koordinasi yang baik antara perencanaan dan keuangan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	5.970.000	3	1.200.000	100,00	20,10	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan LAKIP 2. Penyusunan LPPD 3. Penyusunan LKPJ Faktor Penghambat: 1. data tahun 2021 ke bawah yang tidak terasipkan dengan baik Faktor Pendukung: 1. Adanya pedoman penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ 2. Adanya pendampingan dari Irban III
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	50,00	28.929.462.081	45,00	24.188.006.180	90,00	83,61	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148	28.929.462.081	148	24.188.006.180	100,00	83,61	Keterangan : - Gaji dan Tunjangan Pegawai sebanyak 148 Orang/Bulan faktor Pendorong : - Adanya Sistem Informasi Pegawai (SIPO) Faktor Penghambat : - perubahan SK Pegawai selalu diterima pegawai bersangkutan tidak tepat waktu sesuai tanggal TMT sehingga penyesuaian pembayaran dilakukan pada saat SK diterima.
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	167.235.000	6	103.212.500	100,00	61,72	Keterangan : - Penyusunan Laporan Keuangan (12 dokumen) faktor Pendorong : - Laporan bulanan LAKIP - Sistem Informasi SIMRAL dan SIPD Faktor Penghambat : - Laporan keuangan menunggu hasil laporan Kas Bendahara, Aset dan Laporan Kinerja Pegawai.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	16.222.200	6	4.935.000	100,00	30,42	Keterangan : - Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Pajak (12 dokumen) faktor Pendorong : - Evidence pertanggungjawaban belanja Faktor Penghambat : - adanya ketentuan Revolving SPJ GU baru bisa dilakukan apa bila sudah mencapai lebih dari 50% dari UP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	51,28	623.160.000	50,00	161.649.000	25,94		

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	200.000.000	0	0	0,00	0,00	Keterangan : - 100.000.000 di optimalisasi , PDH masih proses faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : - Mencari Penyedia yang masuk E-Katalog - Masih Proses Pengerjaan Pdh
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6	173.160.000	6	3.800.000	100,00	2,19	Keterangan : - optimalisasi faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : - Para pegawai Banyak yang Tugas Luar Penugasan Audit
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70	250.000.000	34	157.849.000	48,57	63,14	Keterangan : Pelaksanaan Sesuai Jadwal Diklat BPKP Faktor Pendorong : - Ketersediaan Sarana dan Prasarana - Dukungan dari Pimpinan Faktor Penghambat : - Jadwal Diklat bentrok dengan SPT Pengawasan/Penugasan Audit
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	55,56	1.148.254.100	44,44	370.135.469	80,00	32,23	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	100.000.000	0	0	0,00	0,00	Keterangan : - proses perhitungan kebutuhan, anggaran tidak di serap semua sesuai kebutuhan faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : -

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	513.774.700	3	303.976.700	100,00	59,17	Keterangan : Telah dilaksanakan - 1 Paket ATK - 1 paket perabot kantor - 1 Paket Tinta faktor Pendorong : - Ada nya E katalog -Tinta dan perabot kantor Faktor Penghambat : - di katalog per kode rekening jadi ga bisa di gabung paketnya - Paket kertas di buat 2 semester -ATK dan Cetakan diadakan bulan juli menyesuaikan kebutuhan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	160.787.500	1	10.534.000	100,00	6,55	Keterangan : - Ceatakan spanduk SPIP sisanya di bulan agustus dan oktober - sebesar 106.010.000 cetakan di bulan juli faktor Pendorong : - adanya e katalog Faktor Penghambat : - menyesuaikan kebutuhan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	372.341.900	0	55.624.769	0,00	14,94	Keterangan : - SPPD biasa,SPPD Diklat faktor Pendorong : - Laporan perjadiin yang tepat waktu Faktor Penghambat : - hotel diklat p2 sehari 540.000, kemendagri blom ada jadwal - Anggaran persediaan

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1.350.000		0	0,00	0,00	Keterangan : - 25.000.000 akan dilaksanakan di bulan november akan di akomodir untuk laporan akhir PPID faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : - 75.000.000 di optimalisasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00	195.688.400	-	0	0,00	0,00	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	97.844.200	0	0	0,00	0,00	Keterangan : - anggaran dioptimalisasi faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : -
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	97.844.200	0	0	0,00	0,00	Keterangan : - masih menghitung kebutuhan BMD faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50,00	1.484.506.500	50,00	1.095.800.898	100,00	73,82	

	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	320.731.200	6	204.025.800	100,00	63,61	Keterangan : - pembayaran listrik dan telp faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : - menyesuaikan tagihan listrik - anggaran di SIPD per paket
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	1.163.775.300	6	891.775.098	100,00	76,63	Keterangan : - Gaji non ASN - Jasa Angkut sampah - Makmin faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : - anggaran persediaan menyesuaikan pengajuan nya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42,65	618.720.200	131,11	200.706.039	307,38	32,44	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	43.428.300	1	16.249.215	0,00	37,42	Keterangan : - kendaraan pa sinspektur faktor Pendorong : - sesuai dengan nota dinas pengajuan Faktor Penghambat : - sesuai dengan nota dinas pengajuan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	409.406.900	26	149.256.824	0,00	36,46	Keterangan : - mobil 14 dan motor 14 faktor Pendorong : - sesuai dengan nota dinas pengajuan Faktor Penghambat : - sesuai dengan nota dinas pengajuan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	65.885.000	91	35.200.000	101,11	53,43	Keterangan : - AC,printer,mesin FC,laptop,PC faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : - menyesuaikan SSH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	100.000.000	0	0	0,00	0,00	Keterangan : - proses pengerjaan sudah selesai pembayaran sedang proses faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : -
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase ketercapaian Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	1.790.241.000	-	656.583.000	0,00	36,68	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	0	190.260.000	0	19.500.000	0,00	10,25	Keterangan : 1. Pelaksanaan Audit kinerja program dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten Faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : -

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0	991.886.000	0	471.433.000	0,00	47,53	Keterangan : 1. Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemprov Banten kepada Pemerintah Kab./Kota (TA 2022/TA 2023) 2. Probit Audit 3. Monitoring dan Evaluasi LK-OPD TA. 2022 4. Monitoring Kas dan Stok Opname OPD/UPT/Sekolah Tahap 1 dan 2 5. Monitoring / Evaluasi BMD 6. Audit Ketaatan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota 7. Monev Dana Desa dan Kelurahan (APBN) TA 2023 8. Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stock Opname dan rekon aset TA. 2022 pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 9. Monitoring dan Evaluasi LK-OPD TA 2022 10. Monitoring Proses Pengadaan Barang Jasa dan Modal TA 2023 11. Reviu DAK Fisik TA 2023 12. Audit kinerja program prioritas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten 13. Monitoring P3DN Faktor Pendorong : - Adanya PKPT Faktor Penghambat : -
--	--	---	-------------	---	-------------	------	-------	---

Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	0	199.960.000	0	63.300.000	0,00	31,66	Keterangan : 1. Evaluasi SPIP 2. Evaluasi AKIP OPD Provinsi Banten Tahun 2022 3. Pendampingan Hasil Evaluasi AKIP OPD Provinsi Banten Tahun 2022 4. Reviu LPPD Provinsi Banten Faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : -
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	0	358.170.000	0	92.600.000	0,00	25,85	Keterangan : 1. Reviu LKPD TA. 2022 2. Reviu RKPD Murni Tahun 2024 Faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : -Jadwal Penganggaran yang mundur
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0	13.840.000	0	0	0,00	0,00	Keterangan : 1. Dijadwalkan di semester 2
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	0	36.125.000	0	9.750.000	0,00	26,99	Keterangan : - anggaran yang telah diusulkan dalam optimalisasi pada semester pertama akan dilakukan perubahan atau tidak akan diserap.
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	860.280.000	-	160.555.550	0,00	18,66	

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0	316.000.000	0	52.681.050	0,00	16,67	Keterangan : - anggaran yang telah diusulkan dalam optimalisasi pada semester pertama akan dilakukan perubahan atau tidak akan diserap. - ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan mengikuti jadwal dari Kementrian Dalam Negri Faktor Penghambat : - Jadwal masih menunggu dari kementrian - Jumlah kegiatan atau dokumen yang dihasilkan dalam Pemeriksaan masih dalam proses penyelesaian
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	0	544.280.000	0	107.874.500	0,00	19,82	Keterangan : 1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2. Audit Tujuan Tertentu (Probit Audit)
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0	-	0	-	0,00	0,00	Keterangan : 1. Dijadwalkan di bulan september oktober november
Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketercapaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	70,59	400.239.000	70,59	49.200.000	100,00	12,29	

	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12	116.115.000	12	20.400.000	100,00	17,57	Keterangan : 1. Pendampingan ke 12 OPD RB Faktor Pendorong : - Pedoman terkait monev RB Faktor Penghambat : - Terlambatnya turunnya kebijakan dari pusat
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0	284.124.000	0	28.800.000	0,00	10,14	Keterangan : Dijadwalkan dua bulan Juli dan Desember



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023 yang semula sebesar Rp. 71.643.000.000 pada perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten menjadi Rp. 68.122.346.200, ada pengurangan pagu sebesar Rp. 3.520.653.800 yang merupakan optimalisasi anggaran sesuai dengan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten, dengan nomor : 902/ 660-Ekbang/2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 24 Februari 2023.

Berdasarkan surat edaran diatas, maka Inspektorat Daerah Provinsi Banten mengambil Langkah-langkah strategis, sebagai berikut :

- 1) Melakukan efisiensi dan rasionalisasi terhadap belanja yang bersifat rutin dan belanja barang/jasa yang sifatnya masih difasilitasi atau menggunakan asset milik Pemerintah Daerah yang tersedia, antara lain :
 - a. Belanja makanan dan minuman;
 - b. Belanja alat tulis kantor;
 - c. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja pemeliharaan Gedung kantor;
 - f. Belanja modal kendaraan dinas.

- 2) Melakukan reviu HPS kegiatan dengan tim APIP terhadap belanja pemeliharaan konstruksi, belanja pengadaan tanah dan belanja kontruksi, serta menjadwal ulang terhadap pelaksanaannya dengan BPKAD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Kas.

Program dan kegiatan pada tahun 2023 anggaran perubahan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu Indikatif		Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan (APBD 2023 (Murni))	Setelah Perubahan (P- RKPD 2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Indikator Kinerja Sasaran PD: Capaian SAKIP Perangkat Daerah	70-80 Nilai	70-80 Nilai			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indikator Kinerja Program : Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	62.868.778.000	62.695.174.900	- 173.603.100
A	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaianm Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	307.170.000	197.523.000	- 109.647.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Inspektorat)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	246.200.000	136.553.000	- 109.647.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Inspektorat)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.200.000	12.200.000	-

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Inspektorat)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.200.000	12.200.000	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Inspektorat)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000	12.900.000	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Inspektorat)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000	12.900.000	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Inspektorat)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	4.800.000	4.800.000	-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Inspektorat)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5.970.000	5.970.000	-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	55.424.855.600	56.426.976.400	1.002.120.800
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Inspektorat)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Org/Bln	135 Org/Bln	55.057.985.600	56.070.106.400	1.012.120.800
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Inspektorat)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	334.470.000	324.470.000	- 10.000.000

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Inspektorat)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	32.400.000	32.400.000	-
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	1.400.000.000	669.513.000	- 730.487.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Inspektorat)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	200.000.000	104.600.000	- 95.400.000
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Inspektorat)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	64.913.000	- 135.087.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Inspektorat)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	90 Orang	1.000.000.000	500.000.000	- 500.000.000
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	1.607.158.600	1.532.158.600	- 75.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Inspektorat)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Inspektorat)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	513.774.700	513.774.700	-
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Inspektorat)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	181.040.000	181.040.000	-

4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Inspektorat)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	712.343.900	712.343.900	-
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Inspektorat)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1Dokumen	1Dokumen	100.000.000	25.000.000	- 75.000.000
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	200.000.000	100.000.000	- 100.000.000
1	Pengadaan Mebel (Inspektorat)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	-	- 100.000.000
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	100.000.000	100.000.000	-
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.876.019.000	2.792.239.000	- 83.780.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Inspektorat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	641.462.400	641.462.400	-
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Inspektorat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.234.556.600	2.150.776.600	- 83.780.000
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.053.574.800	976.764.900	- 76.809.900

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Inspektorat)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	80.000.000	80.000.000	-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Inspektorat)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	641.804.800	564.994.900	- 76.809.900
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	181 Unit	131.770.000	131.770.000	-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Inspektorat)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	-
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indikator Kinerja Sasaran PD : Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal	14 Nilai	14 Nilai	7.789.982.000	4.661.644.500	- 3.128.337.500
		Indikator Kinerja Sasaran PD : Nilai Maturitas SPIP	3.13 Nilai	3.13 Nilai			-
		Indikator Kinerja Program : Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	100 Persen			-
		Indikator Kinerja Program : Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	80 Persen	80 Persen			-

A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase ketercapaian Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	100 Persen	6.102.504.000	3.394.484.000	- 2.708.020.000
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Inspektorat)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	556.600.000	527.800.000	- 28.800.000
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	4.451.184.000	1.865.054.000	- 2.586.130.000
3	Reviu Laporan Kinerja (Inspektorat)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	361.820.000	353.180.000	- 8.640.000
4	Reviu Laporan Keuangan (Inspektorat)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	632.770.000	606.250.000	- 26.520.000
5	Kerjasama Pengawasan Internal (Inspektorat)	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	27.680.000	18.800.000	- 8.880.000
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	72.450.000	23.400.000	- 49.050.000
B	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	100 Persen	1.687.478.000	1.267.160.500	- 420.317.500
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Inspektorat)	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	733.422.000	476.960.500	- 256.461.500
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Inspektorat)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	2 Laporan	954.056.000	790.200.000	- 163.856.000

III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indikator Kinerja Sasaran PD : Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	1 unit Kerja	1 unit Kerja	984.240.000	765.526.800	- 218.713.200
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 Persen	100 Persen	137.756.000	78.312.800	- 59.443.200
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Inspektorat)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	137.756.000	78.312.800	- 59.443.200
B	Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketercapaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	100 Persen	846.484.000	687.214.000	- 159.270.000
1	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Inspektorat)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12 OPD	12 OPD	275.160.000	222.840.000	- 52.320.000
2	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inspektorat)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	571.324.000	464.374.000	- 106.950.000
JUMLAH PAGU					71.643.000.000	68.122.346.200	- 3.520.653.800

Tabel 3.2 Pendanaan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),Kegiatan (Itermediate Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
INSPEKTORAT DAERAH					68.122.346.200	Inspektorat
Tujuan PD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Sasaran PD : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP 77.92	Nilai SAKIP 70-80	62.695.174.900	Inspektorat
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			197.523.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Inspektorat)			136.553.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Inspektorat)			12.200.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Inspektorat)			12.200.000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Inspektorat)			12.900.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Inspektorat)			12.900.000	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Inspektorat)			4.800.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Inspektorat)			5.970.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			56.426.976.400	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Inspektorat)			56.070.106.400	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Inspektorat)			324.470.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Inspektorat)			32.400.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			669.513.000	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Inspektorat)			104.600.000	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Inspektorat)			64.913.000	

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Inspektorat)			500.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.532.158.600	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Inspektorat)			100.000.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Inspektorat)			513.774.700	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Inspektorat)			181.040.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Inspektorat)			712.343.900	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Inspektorat)			25.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.000.000	
		Pengadaan Mebel (Inspektorat)			-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat)			100.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.792.239.000	

		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Inspektorat)			641.462.400	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Inspektorat)			2.150.776.600	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			976.764.900	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Inspektorat)			80.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Inspektorat)			564.994.900	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat)			131.770.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Inspektorat)			200.000.000	

Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sasaran PD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas SPIP Level 3	Maturitas SPIP Level 3	4.661.644.500	
				SAKIP Komponen Penilaian Internal nilai 14		
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			3.394.484.000	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Inspektorat)			527.800.000	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Inspektorat)			1.865.054.000	
		Reviu Laporan Kinerja (Inspektorat)			353.180.000	
		Reviu Laporan Keuangan (Inspektorat)			606.250.000	
		Kerjasama Pengawasan Internal (Inspektorat)			18.800.000	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat)			23.400.000	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			1.267.160.500	

		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Inspektorat)			476.960.500	
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Inspektorat)			790.200.000	
	Sasaran PD : Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja pelayanan publik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas APIP level 3	1 unit kerja Zona Integritas	765.526.800	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			78.312.800	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Inspektorat)			78.312.800	
		Pendampingan dan Asistensi			687.214.000	
		Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Inspektorat)			222.840.000	
		Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inspektorat)			464.374.000	
					68.122.346.200	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan menjabarkan Kebijakan dan Program Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ke dalam kegiatan, dalam rangka mendukung Prioritas Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023, selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) Program antara lain :

- a. Program Penunjang Umum Pemerintah Daerah;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Program Perumusan Kebijakan Pemdampingan dan Asistensi

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam 11 (Sebelas) rencana kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Tahun 2022 dan 2023 serta penjabaran dari isu dan permasalahan yang ada, diantaranya :

- a. Penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap satuan Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten yang memiliki latar belakang pengalaman di bidang pengawasan.

- c. Kebijakan penyelenggaraan pengawasan terhadap azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan efektif.
- d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dibuat sering mengalami perubahan jadwal pelaksanaan.
- e. Belum adanya sinkronisasi Program Kerja Pengawasan antara BPKP dengan Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Serang, Agustus 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



Dr. Ir. MOCH TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005